



# **RENCANA KERJA**

**TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

*"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"*





**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

## BAB II

### JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

## BAB III

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip Penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V  
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 31 Juli 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 31 Juli 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya, dengan berlandaskan semangat untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, maka tersusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja Perangkat Daerah dalam kaitan dan upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan terbangun sinergitas dan sinkronisasi dengan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dan Rencana Kerja RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam bingkai system perencanaan yang sistematis dan integral.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berbasis hasil evaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis kinerja pelayanan OPD serta mempertimbangkan isu-isu penting pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat dalam upaya menghasilkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025, Amin.

Sungailiat, 30 Juli 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**



**Mulyarto Kurniawan, S.Pd.,M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP.198103112003121002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1      Latar Belakang .....	1
1.2      Landasan Hukum .....	3
1.3      Maksud dan Tujuan .....	8
1.4      Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>10</b>
2.1      Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.1.1    Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. ....	10
2.1.2    Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. ....	11
2.1.3    Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	12
2.1.4    Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja progam/kegiatan.....	13
2.1.5    Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah .....	14
2.1.6    Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut . ....	23
2.2      Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.3      Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	39
2.4      Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	41
2.5      Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	75
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>81</b>
3.1      Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	81
3.2      Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	81
3.3      Program dan Kegiatan .....	83



<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>86</b>
	4.1 Rencana Kerja dan Pendaan Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan tahun 2025.....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
	Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.	

## DAFTAR TABEL

2.1.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari Evaluasi Program/Kegiatan	
	Realisasi yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran.....	11
2.1.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari Evaluasi Program/Kegiatan	
	Realisasi yang Telah Memenuhi Target Kinerja/Keluaran .....	12
2.1.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari Evaluasi Program/Kegiatan	
	Realisasi yang Melebihi Target Kinerja/Keluaran .....	13
2.1.4	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka .....	15
T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 .....	24
T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Bangka .....	38
T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	43
T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	76
3.2.1	Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 .....	82
3.2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka .....	82
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka .....	87

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Dokumen RENJA tahunan yang mengacu pada Dokumen RENSTRA.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di Tahun 2025. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan Rencana, dan tahap penetapan rencana kerja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Rencana Kerja OPD,

orientasi mengenai RKPD dan Rencana Kerja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional. Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluran irigasi).
- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah

baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Bangka harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1220);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;



32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 3 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Sumber Air Baku (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 4 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 46A Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 54);
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 13);

42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 92);
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 85);
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
46. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
47. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2025.
- b. Memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Memastikan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka demi terlaksananya fungsi pelayanan yang optimal
- d. Sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS, RKA dan DPA Tahun 2025

## 1.4 Sistematika Penulisan

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulis

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2025

### BAB V PENUTUP

Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi hasil dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Bangka.

##### 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat 2 Program yang realisasi tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian salah satu sasaran strategis PD yaitu meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan indicator Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi, terealisasi sebesar 95,47% dari target 96,25% atau capaian sebesar 99,19%. Faktor

penyebab tidak tercapainya target kinerja program dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian salah satu sasaran strategis PD yaitu meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum, terealisasi sebesar 91,53% dari target 93,10% atau capaian sebesar 98,31%. Pencatatan dalam Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa target merupakan jumlah seluruh KK per kelurahan/desa tidak sebanding dengan anggaran untuk tahun berjalan. Seharusnya target berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun berjalan.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari Evaluasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.1 berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
					2023	2023
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	%	96,25	95,47
			Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	%	93,10	91,53

Sumber data : Laporan Kinerja TA 2023 DPUPR Kab. Bangka

### 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat 5 program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian salah satu sasaran strategis PD yaitu meningkatnya kualitas penataan ruang dengan indikator ketaatan terhadap RTRW terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau dengan capaian 100%.
2. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR dapat di ukur dengan 4 program yaitu :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,

- Program Penataan Bangunan,
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, dan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari Evaluasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.2 berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
					2023	2023
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB

### 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

Terdapat 3 program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023, yaitu :

1. Keberhasilan sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indicator persentase jalan dalam kondisi baik terealisasi sebesar 79,26% dari target 78,85% atau capaian sebesar 100,52% dapat diukur dengan 2 program yaitu :
  - Program Penyelenggaraan Jalan, dan
  - Program Pengembangan Permukiman.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai alat ukur sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indicator persentase luas daerah irigasi kondisi baik yang terealisasi sebesar 99,55% dari target 98,12% atau dengan capaian sebesar 101,46%.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari Evaluasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.3 berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
					2023	2023
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Proporsional	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	78,85	79,26
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,12	99,55

#### **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas. Dalam pencapaian dari 4 sasaran strategi yang ditetapkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

- a. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi baik, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100,52 %.
- b. Persentase Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik, sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 101,46%.
- c. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi, dengan capaian sebesar 99,19%. Belum terlaksana dengan maksimal disebabkan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program tersebut dan masih terdapat masyarakat yang pola hidupnya belum sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang ada. Adanya warga yang melakukan BABS, masih menggunakan saluran air sebagai sarana buang air dengan alasan belum terbiasa dengan kloset. Solusi yang telah dilakukan adalah pembinaan secara bertahap tentang kesehatan lingkungan dengan harapan penyaluran SR akan meningkat.

- d. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum, dengan capaian sebesar 98,31%. Belum terlaksana dengan maksimal disebabkan karena adanya kekeliruan Pencatatan target dalam Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa target merupakan jumlah seluruh KK per kelurahan/desa tidak sebanding dengan anggaran untuk tahun berjalan. Seharusnya target berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun berjalan.
- e. Ketaatan Terhadap RTRW, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran pencapaian dari formulir isian LAKIN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut, antara lain:

- a. Pemantapan pemahaman dan implementasi konsep akuntabilitas tiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.

#### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah**

Program dan kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran berimplikasi pada capai kinerja tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra sebagai berikut:

- Oleh karenanya untuk target Renstra periode tahun selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk direncanakan kembali kelanjutan program yang dimaksud dengan perencanaan yang lebih matang.

Adapun Realisasi Anggaran DPUPR Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.4 berikut :



**Tabel 2.1.4**  
**Realisasi Anggaran TA 2023**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
<b>1</b>	<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.078.606.391,00</b>	<b>9.684.568.064,00</b>	<b>87,42</b>	<b>1.394.038.327,00</b>
	<b>1.03.01.2.01</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>166.050.200,00</b>	<b>107.654.333,00</b>	<b>64,83</b>	<b>58.395.867,00</b>
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	38.016.800,00	76,03	11.983.200,00
	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.015.270,00	7.929.900,00	79,18	2.085.370,00
	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.015.340,00	1.009.000,00	10,07	9.006.340,00
	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.029.550,00	7.092.350,00	70,71	2.937.200,00
	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.029.425,00	4.377.000,00	43,64	5.652.425,00
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.980.035,00	25.949.583,00	64,91	14.030.452,00
	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.980.580,00	23.279.700,00	64,70	12.700.880,00
	<b>1.03.01.2.02</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.075.973.684,00</b>	<b>5.914.163.663,00</b>	<b>83,58</b>	<b>1.161.810.021,00</b>
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.983.339.834,00	5.837.396.098,00	83,59	1.145.943.736,00



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.733.850,00	43.822.150,00	84,71	7.911.700,00
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.450.000,00	8.056.775,00	77,10	2.393.225,00
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.450.000,00	24.888.640,00	81,74	5.561.360,00
	<b>1.03.01.2.05</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>80.685.000,00</b>	<b>61.478.882,00</b>	<b>76,20</b>	<b>19.206.118,00</b>
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.748.000,00	99,98	2.000,00
	1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28.200.000,00	26.288.894,00	93,22	1.911.106,00
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.735.000,00	25.441.988,00	59,53	17.293.012,00
	<b>1.03.01.2.06</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>587.681.760,00</b>	<b>534.327.984,00</b>	<b>90,92</b>	<b>53.353.776,00</b>
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.816.575,00	286.440.000,00	99,18	2.376.575,00
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.275.000,00	229.945.373,00	87,67	32.329.627,00
	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.890.185,00	17.942.611,00	72,09	6.947.574,00
	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.700.000,00	0,00	-	11.700.000,00



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	<b>1.03.01.2.07</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>110.549.550,00</b>	<b>103.984.800,00</b>	<b>94,06</b>	<b>6.564.750,00</b>
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.549.550,00	103.984.800,00	94,06	6.564.750,00
	<b>1.03.01.2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.537.776.197,00</b>	<b>2.466.823.759,00</b>	<b>97,20</b>	<b>70.952.438,00</b>
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.188.359.100,00	2.135.486.569,00	97,58	52.872.531,00
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.029.782,00	188.157.828,00	91,77	16.871.954,00
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.387.315,00	143.179.362,00	99,16	1.207.953,00
	<b>1.03.01.2.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>519.890.000,00</b>	<b>496.134.643,00</b>	<b>95,43</b>	<b>23.755.357,00</b>
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.395.000,00	255.100.643,00	95,05	13.294.357,00
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	48.480.000,00	40.050.000,00	82,61	8.430.000,00
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.015.000,00	200.984.000,00	99,00	2.031.000,00
<b>2</b>	<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>8.315.515.505,00</b>	<b>7.004.853.874,00</b>	<b>84,24</b>	<b>1.310.661.631,00</b>
	<b>1.03.02.2.01</b>	<b>PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.693.290.550,00</b>	<b>6.424.884.646,00</b>	<b>83,51</b>	<b>1.268.405.904,00</b>



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	109.594.100,00	83.727.271,00	76,40	25.866.829,00
	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	151.735.000,00	76.270.186,00	50,27	75.464.814,00
	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.807.960.000,00	1.649.469.877,00	91,23	158.490.123,00
	1.03.02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	3.969.000.000,00	3.186.914.053,00	80,30	782.085.947,00
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.091.000.000,00	931.283.259,00	85,36	159.716.741,00
	1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	564.001.450,00	497.220.000,00	88,16	66.781.450,00
	<b>1.03.02.2.02</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 100 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>622.224.955,00</b>	<b>579.969.228,00</b>	<b>93,21</b>	<b>42.255.727,00</b>
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	101.784.955,00	72.584.885,00	71,31	29.200.070,00
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.235.000,00	296.400.000,00	98,72	3.835.000,00
	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	220.205.000,00	210.984.343,00	95,81	9.220.657,00
<b>3</b>	<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>1.144.337.790,00</b>	<b>1.110.681.262,00</b>	<b>97,06</b>	<b>33.656.528,00</b>



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	<b>1.03.03.2.01</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.144.337.790,00</b>	<b>1.110.681.262,00</b>	<b>97,06</b>	<b>33.656.528,00</b>
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	39.337.790,00	31.090.000,00	79,03	8.247.790,00
	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.105.000.000,00	1.079.591.262,00	97,70	25.408.738,00
<b>4</b>	<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>1.448.683.880,00</b>	<b>1.003.004.425,00</b>	<b>69,24</b>	<b>445.679.455,00</b>
	<b>1.03.05.2.01</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DIMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.448.683.880,00</b>	<b>1.003.004.425,00</b>	<b>69,24</b>	<b>445.679.455,00</b>
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabuapten/Kota	3.157.660,00	400.000,00	12,67	2.757.660,00
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.200.000.000,00	773.178.885,00	64,43	426.821.115,00
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	245.526.220,00	229.425.540,00	93,44	16.100.680,00
<b>5</b>	<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>10.305.996.245,00</b>	<b>9.115.596.551,00</b>	<b>88,45</b>	<b>1.190.399.694,00</b>
	<b>1.03.07.2.01</b>	<b>PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.305.996.245,00</b>	<b>9.115.596.551,00</b>	<b>88,45</b>	<b>1.190.399.694,00</b>



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.305.996.245,00	9.115.596.551,00	88,45	1.190.399.694,00
<b>6</b>	<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>16.222.340.000,00</b>	<b>15.269.333.000,00</b>	<b>94,13</b>	<b>953.007.000,00</b>
	<b>1.03.08.2.01</b>	<b>PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>16.222.340.000,00</b>	<b>15.269.333.000,00</b>	<b>94,13</b>	<b>953.007.000,00</b>
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16.222.340.000,00	15.269.333.000,00	94,13	953.007.000,00
<b>7</b>	<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>610.727.475,00</b>	<b>526.999.417,00</b>	<b>86,29</b>	<b>83.728.058,00</b>
	<b>1.03.09.2.01</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>610.727.475,00</b>	<b>526.999.417,00</b>	<b>86,29</b>	<b>83.728.058,00</b>
	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	460.727.475,00	418.021.691,00	90,73	42.705.784,00
	1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	150.000.000,00	108.977.726,00	72,65	41.022.274,00
<b>8</b>	<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>147.413.646.052,00</b>	<b>128.207.597.422,00</b>	<b>86,97</b>	<b>19.206.048.630,00</b>



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>147.413.646.052,00</b>	<b>128.207.597.422,00</b>	<b>86,97</b>	<b>19.206.048.630,00</b>
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.115.954.540,00	824.117.240,00	73,85	291.837.300,00
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	592.000.000,00	393.394.000,00	66,45	198.606.000,00
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	111.485.293.736,00	93.629.337.120,00	83,98	17.855.956.616,00
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	28.220.929.776,00	28.035.939.575,00	99,34	184.990.201,00
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.039.530.000,00	2.936.156.987,00	96,60	103.373.013,00
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	1.607.000.000,00	1.042.474.500,00	64,87	564.525.500,00
	1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1.352.938.000,00	1.346.178.000,00	99,50	6.760.000,00
<b>9</b>	<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>202.460.000,00</b>	<b>106.840.582,00</b>	<b>52,77</b>	<b>95.619.418,00</b>
	<b>1.03.11.2.01</b>	<b>PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>104.380.582,00</b>	<b>52,19</b>	<b>95.619.418,00</b>
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	104.380.582,00	52,19	95.619.418,00
	<b>1.03.11.2.02</b>	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>980.247.150,00</b>	<b>908.126.064,00</b>	<b>92,64</b>	<b>72.121.086,00</b>



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
				KEUANGAN	KEU (%)	
	<b>1.03.12.2.01</b>	<b>PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>343.891.900,00</b>	<b>324.610.577,00</b>	<b>94,39</b>	<b>19.281.323,00</b>
	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	343.891.900,00	324.610.577,00	94,39	19.281.323,00
	<b>1.03.12.2.02</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>250.755.250,00</b>	<b>230.062.017,00</b>	<b>91,75</b>	<b>20.693.233,00</b>
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	250.755.250,00	230.062.017,00	91,75	20.693.233,00
	<b>1.03.12.2.03</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>254.600.000,00</b>	<b>239.269.390,00</b>	<b>93,98</b>	<b>15.330.610,00</b>
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	254.600.000,00	239.269.390,00	93,98	15.330.610,00
	<b>1.03.12.2.04</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>131.000.000,00</b>	<b>114.184.080,00</b>	<b>87,16</b>	<b>16.815.920,00</b>
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	131.000.000,00	114.184.080,00	87,16	16.815.920,00
<b>JUMLAH</b>			<b>197.722.560.488,00</b>	<b>172.937.600.661,00</b>	<b>87,46</b>	<b>24.784.959.827,00</b>

Keterangan: \* Berdasarkan LRA di Sistem Informasi Keuangan Daerah DPUPR dan Realisasi Keuangan di Laporan Fisik DPUPR

### **2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut**

- Melakukan review terhadap target kinerja dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.
- Menyusun perencanaan kegiatan secara akurat dan akuntabel serta berpedoman pada dokumen yang telah disusun.
- Untuk program/kegiatan yang sifatnya urgen tetapi belum direkomendasikan dalam dokumen Renstra agar dibuatkan penjelasan dan dicantumkan kedalam dokumen Renstra pada saat dilakukan review.
- Menyusun Perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan tahapan target
- Mempertimbangkan untuk di rencanakan kembali pada dokumen Review Renstra periode selanjutnya.
- Pemantapan pemahaman dan implementasi konsep akuntabilitas tiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.

Untuk pertimbangan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas diperoleh dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Bangka disajikan dalam tabel di bawah ini:



**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian**  
**Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Bangka**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03	URUSAN PEMERINTAH BIDAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,00	22,00	25,00	25,00	28,50	26,78	111,58	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,22	101,83	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	64,56	64,56	64,56	64,56	57,80	64,56	99,69	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	89,74	
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	60,00	60,00	60,00	60,00	85,00	60,00	85,71	
1 03 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang di susun (dokumen)	6	6	6	6		6	Dokumen	14	Dokumen	77,78
1 03 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5	Dokumen	5	Dokumen	100,00
1 03 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
1 03 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
1 03 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
1 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	8	8				4	Dokumen	12	Dokumen	50,00
1 03 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8	Laporan	8	Laporan	100,00
<b>1 03 01 2 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang di susun (bulan)	12	12	12	12		63	Orang	87	Orang	241,67
1 03 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD						12	Dokumen	12	Dokumen	100,00
1 03 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2	Dokumen	2	Dokumen	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD						40	Dokumen	40	Dokumen	100,00
1 03 01 2 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)</b>	<b>18,46</b>	<b>18,46</b>	<b>18,46</b>	<b>18,46</b>		<b>43,48</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>
		<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		100		<b>100</b>
		<b>Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		100		<b>100</b>
1 03 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia, jumlah pakaian olahraga yang tersedia (stell)	16	16	16	16		1	Paket	17	Paket	47,22
1 03 01 2 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						11	Dokumen	11	Dokumen	100,00
1 03 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	12	0				10	Orang	5	Orang	13,89
1 03 01 2 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>85,00</b>		100		<b>100</b>
1 03 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	12	12	7	7		13	Paket	32	Paket	88,89
1 03 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani, Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang tertangani (bulan)	12	12	12	12		12	Laporan	36	Laporan	100,00
1 03 01 2 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD						12	Dokumen	12	Dokumen	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat at Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD						1	Dokumen	1	Dokumen	8,33
<b>1 03 01 2 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>				<b>85,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>
1 03 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional (unit)	1	0				0,00		0		0,00
1 03 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel						0	Paket	0	Paket	0,00
1 03 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41	Unit	41	Unit	205,00
<b>1 03 01 2 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
		<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>33,33</b>
1 03 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani (bulan)	12	12	12	12		1	Dokumen	25	Dokumen	69,44
1 03 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan penyediaan internet yang tertangani (bulan)	12	12	12	12		12	Laporan	36	Laporan	100,00
		Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)	12	12	12	12		12		29		80,56
		Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)	12	12	12	12		12		29		80,56
1 03 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor yang tertangani (bulan)	12	12	12	12		1	Laporan	25	Laporan	69,44
<b>1 03 01 2 09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik (%)</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>100</b>		<b>75,00</b>		<b>65</b>		<b>86,67</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Unit	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1 03 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang dipelihara (unit)	6	6	7	7		7	Unit	20	Unit	111,11
1 03 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara (paket)	1	1	70	70		40	Unit	111	Unit	92,50
1 03 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	1	2	2		2	Unit	4	Unit	133,33
1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)</b>						<b>98,12</b>		<b>66,00</b>		<b>97,06</b>
		<b>Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (%)</b>						<b>82,75</b>		<b>60,50</b>		<b>96,41</b>
1 03 02 2 01	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah</b>	<b>Panjang Jaringan Drainase Sungai Dalam Kondisi Baik (km)</b>						<b>24,20</b>		<b>69,00</b>		<b>94,52</b>
1 03 02 2 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya yang disusun	1	1				1	Dokumen	2	Dokumen	66,67
1 03 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Ar ainnya yang di bangun						1	Unit	1	Unit	100,00
1 03 02 2 01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	8	8	7	7		1		15		50,00
1 03 02 2 01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang direhabilitasi						1,2	KM	1	KM	2,89
1 03 02 2 01 34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	28	28	24	24				52		69,33
1 03 02 2 01 35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang ditingkatkan						3,5	KM	4	KM	60,00
1 03 02 2 01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi	4	4	7	7		7,5	KM	19	KM	158,33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 02 2 01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing yang dipelihara	3	3	4	4		12,00	KM	20	KM	219,44
<b>1 03 02 2 02</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengeloalaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (km)</b>						<b>68,00</b>		<b>67,00</b>		<b>98,53</b>
1 03 02 2 02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1	0	1	1		1	Dokumen	3	Dokumen	100,00
1 03 02 2 02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang direhabilitasi	4	4	1	1		-	KM	5	KM	41,67
1 03 02 2 02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	12	12	1	1		0,8	KM	14	KM	38,50
1 03 02 2 02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	12	12	12	12		6	Unit	30	Unit	83,33
<b>1 03 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Cakupan Layanan Air Bersih (%)</b>						<b>43,00</b>		<b>162,91</b>		<b>217,21</b>
<b>1 03 03 2 01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah</b>	<b>Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik (SR)</b>						<b>400</b>		<b>696</b>		<b>38,68</b>
1 03 03 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	3	3	1	1		1	Dokumen	5	Dokumen	55,56
1 03 03 2 01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM	12	0	3	3		0,00	Dokumen	12	Dokumen	33,33
1 03 03 2 01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibangun	2	2				0,00	SR	2	SR	33,33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 03 2 01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Ditingkatkan	3	3	8	8		5	Unit	16	Unit	177,78
1 03 03 2 01 08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	2	2				0,00	SR	2	SR	33,33
1 03 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Perentase Desa/Kelurahan yang Memiliki TPA/ TPST/ SPA/TPS-3R/TPS (%)</b>						0,00		4,94		80,06
1 03 04 2 01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Unit Pengolahan Sampah yang beroperasi dengan baik (%)</b>	75	100				0,00		80,00		94,12
1 03 04 2 01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (unit)	1	1				0,00		1		33,33
1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Desa/ Kelurahan Yang Memiliki SPAL</b>						75,00		165,67		220,89
1 03 05 2 01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sistem jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik (SR)</b>						75	Unit	50,00	Unit	11,11
1 03 05 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang Disusun			1	1		1	Dokumen	3	Dokumen	100,00
1 03 05 2 01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	150	150				100	Rumah Tangga	210	Rumah Tangga	46,67
1 03 05 2 01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air limbah	12	12	12	12		1	Unit	25	Unit	69,44



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		domestik yang Dipoperasikan dan Dipelihara									
1 03 05 2 01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	150	150	1	1	0	Rumah Tangga	200	Rumah Tangga	44,44
1 03 07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)</b>					100,00		65,00		86,67
1 03 07 2 01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategi Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)</b>	100	100	100	100	75		100		100
1 03 07 2 01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	2	22	21	53	Sistem Jaringan	80	Sistem Jaringan	200,00
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung Publik yang Tertata (%)</b>					100,00		56,00		83,58
1 03 08 2 01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perencanaan Konstruksi Bangunan yang Diselesaikan (%)</b>	100	100	100	100	100	%	100		100
1 03 08 2 01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLR), Peran Ahli Tenaga Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLR), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	1	1			0		2		66,67
1 03 08 2 01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	5	Dokumen	6	Dokumen	200,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023								
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	03	09							100,00		67,50		89,05				
1	03	09	2	01					100	100	100		100,00	100,00			
1	03	09	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota										
									1	1	1	Dokumen	2	Dokumen	66,67		
1	03	09	2	01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan										
									1		1	Dokumen	1	Dokumen	50,00		
1	03	10											80,24	66,90	95,23		
1	03	10	2	01													
1	03	10	2	01					100	100	100		65,00	100	100		
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencanan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advice dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian										
									12	12	2	2	1	Dokumen	25	Dokumen	69,44
1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7,87	7,87	12	12		1,8	KM	17,74	KM	105,58
1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	15,73	15,73	66	66		0	KM	99,94	KM	366,06
1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	3,07	3,07	4	4		0	KM	32,38	KM	128,48
1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dilakukan pemeliharaan secara rutin	38,08	38,08	8	8		110	KM	206,87	KM	172,39
1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	6	6	3	3		26	Meter	28,00	Meter	140,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 10 2 01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin			1	1		0	Meter	100	Meter	50,00
1 03 10 2 01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	9,71	9,71	1	1		0	Meter	500	Meter	83,33
1 03 10 2 01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi /Terekonstruksi Akibat Bencana	6	6	1	1		15,5	KM	17,5	KM	583
1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Presntase SDM Jasa Konstruksi yang terlatih (%)</b>						<b>100,00</b>		<b>65,00</b>		<b>86,67</b>
1 03 11 2 01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih</b>						<b>50</b>	<b>Orang</b>	<b>50,00</b>	<b>Orang</b>	<b>90,91</b>
1 03 11 2 01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Mengikuti Pelatihan						50	Orang	160	Orang	53,33
1 03 11 2 01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
1 03 11 2 02	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi</b>						<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>0,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>0,00</b>
1 03 11 2 02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi						1	Laporan	1	Laporan	8,33
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)</b>						<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
1 03 12 2 01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Komponen Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana dalam penyusunan dokumen perencanaan (dokumen)</b>						<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>166,67</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1 03 12 2 01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi,Evaluasi,Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						5	Dokumen	5	Dokumen	500,00
1 03 12 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota						0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
1 03 12 2 01 03	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	1	3	3		0	Dokumen	4	Dokumen	133,33
1 03 12 2 01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang						0	Dokumen	0,00	Dokumen	0,00
<b>1 03 12 2 02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Penataan Ruang sesuai dengan Tata Ruang (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
1 03 12 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	1	1	1		1	Dokumen	3	Dokumen	100,00
<b>1 03 12 2 03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100,00</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
1 03 12 2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	1				2	Dokumen	4	Dokumen	133,33
<b>1 03 12 2 04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang (%)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1 03 12 2 04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1	1		1	Dokumen	1,00	Dokumen	33,33

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan serta perizinan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
3. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
4. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang, penyehatan lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
5. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan UPT; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A terdiri dari :

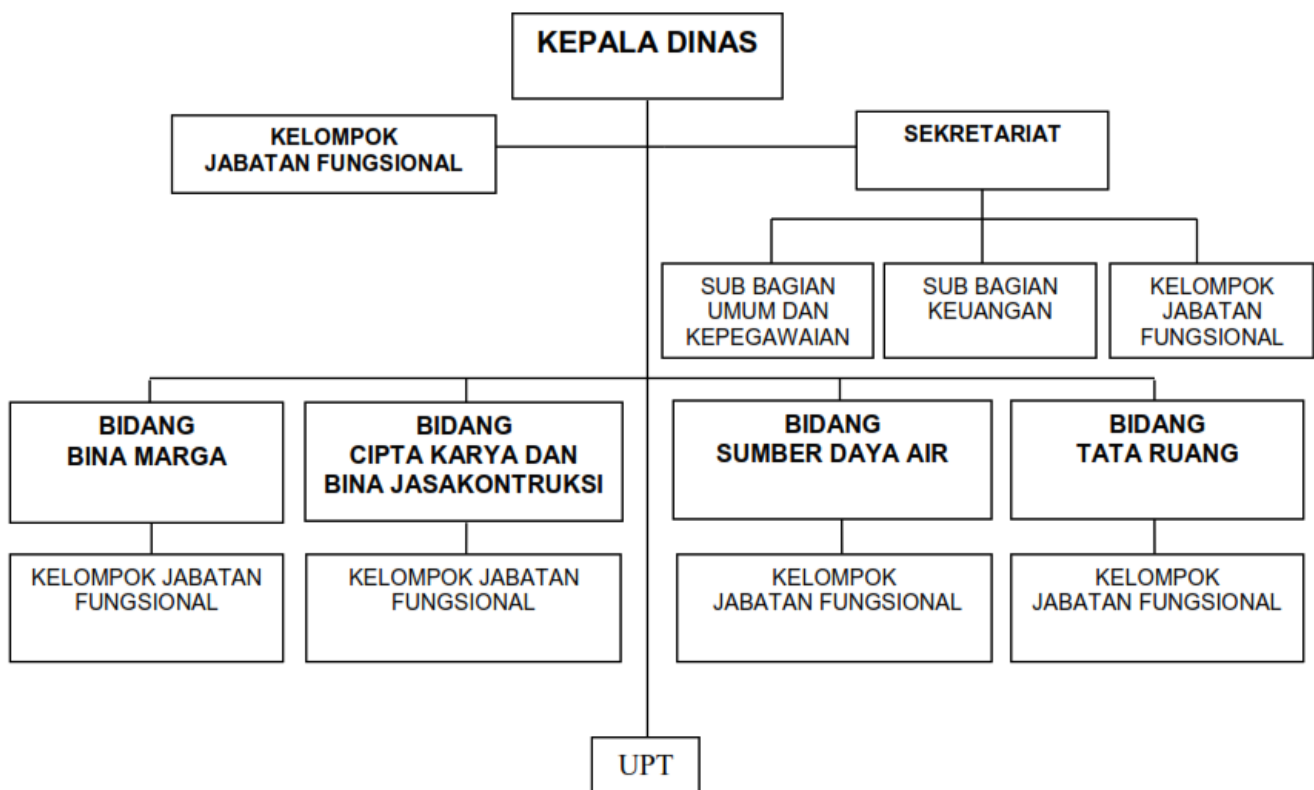
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sekretaris;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TIPE A KABUPATEN BANGKA**

---



Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariat yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan.

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pemberian rekomendasi/fatwa Izin Mendirikan Bangunan, penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional, pengelolaan sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur permukiman.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengairan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air.

Berikut Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka pada awal dokumen Rencana Strategis 2019 sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan tahun 2024.



**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Bangka**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	-	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota	76,12	77,32	78,50	100,52	77,12	78,32	79,50	
2	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</li> <li>- Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota</li> <li>- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</li> </ul>	43,15	44,12	45,05	101,46	44,15	45,12	46,05	
3	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	95,90	96,75	97,56	99,19	96,90	97,75	98,56	
4	Persentase Rumah tangga yang Terakses Air Minum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	92,25	93,42	94,56	98,31	93,25	94,42	95,56	
5	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	100	100	100	91,66	100	100	100	
6	Nilai Evaluasi AKIP	-	Nilai	A	A	A	BB	A	A	A	

Sumber Data : Format berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan isi berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Laporan Kinerja DPUPR TA 2023

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan target dari indicator yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan capaian indicator Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi air limbah pada daerah perdesaan menyebabkan banyaknya jamban yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena ketidakpedulian masyarakat akan kebersihan, kesehatan dan kebiasaan menggunakan jamban. Terdapat masyarakat yang pola hidupnya belum sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang ada.

Keterlibatan dan komitmen antara pemangku-kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat masih kurang, sehingga diperlukan untuk melakukan rembug dan bertindak sesuai kebijakan atau pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada serta kesepakatan atas peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah. Seperti keterlibatan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan terhadap pengelolaan air limbah yang harus lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada.

- 2) Alokasi anggaran yang minim untuk pembangunan pengolahan air limbah. Hal ini juga dikarenakan perhatian yang terbatas terhadap pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari minimnya usulan-usulan terkait sanitasi air limbah dari masyarakat atau dewan perwakilan rakyat daerah pada dokumen perencanaan. Kurangnya perhatian terhadap sanitasi air limbah ini juga menyebabkan infrastruktur yang terbangun tidak terawat sehingga perbaikan akan lebih mahal daripada pencegahan.
- 3) Keterbatasan data-data yang valid dalam sarana prasarana air limbah dan air minum sehingga sulit dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan serta tidak optimalnya SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka dalam pencatatan terhadap indicator target pada pelaporan Standar Pelayanan Minimal terkait pelaporan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan

penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic yang mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka selaras dengan Visi pembangunan Kabupaten Bangka 2019-2023 "BANGKA SETARA", dengan mendukung Misi ke 3 yaitu "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah" dan Misi ke 5 yaitu "Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan" serta Tujuan Kabupaten yaitu "*meningkatkan kualitas infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat*"

Sasaran Strategis Dinas PUPR guna upaya mencapai indicator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur
2. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar
3. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
4. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dampak Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan tidak signifikan mempegaruhi terhadap Visi Misi Kepala Daerah karena persentase capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 99,19% masih dalam kategori **Baik** dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum sebesar 98,31% dalam kategori **Baik**

Tantangan serta peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah :

1. Tantangannya :
  - belum semua masyarakat memiliki akses terhadap air minum dan pelayanan air limbah.
  - Masih ditemukannya jalan dalam kondisi berat
  - Belum semua saluran dan sungai dapat terkelola dengan anggaran yang tersedia.
  - Masih kurangnya sanitasi limbah domestic

## 2. Peluangnya :

- Diharapkan tersedianya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah;
- Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan jalan, bekerjasama dengan pihak swasta
- Keberadaan pihak swasta dalam meningkatkan akses pelayanan terhadap air minum dan pelayanan air limbah.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yang mesti mendapat perhatian intens sehingga tingkat kinerja pelayanan dapat tercapai, sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akses air minum
- 2) Meningkatnya Akses Sanitasi
- 3) Penanganan Tanggap Darurat Infrastruktur yang cepat dan tertangani
- 4) Pemulihan Ekonomi Daerah
- 5) Pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai dengan peruntukannya
- 6) Akses Pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang mudah dan cepat
- 7) Koordinasi yang baik dengan badan/dinas terkait dalam hal pemenuhan data maupun informasi lainnya
- 8) Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas
- 9) Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam proses Rancangan Awal RKPD dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Setelah melewati beberapa tahapan penyusunan dengan menghadiri pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan serta kecamatan dan sampai dengan forum lintas perangkat daerah. Sehingga mempertimbangkan usulan-usulan yang masuk di tahap finalisasi pada pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten.



Mempertimbangkan Usulan kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang bertujuan untuk menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta target output pada Tahun 2025 merupakan Tahun kedua dari rencana strategis Tahun 2024-2026 yang telah disusun tidak ada perbedaan antara Rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada tahun 2025.

Secara rinci Rancangan Awal RKPD dan Kebutuhan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C. 31 yaitu Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 sebagai berikut :



**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Bangka**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
			Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			
			Nilai Evaluasi Akip	BB(79,60)				Nilai Evaluasi Akip	BB(79,60)		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29,80	21.211.083.160,51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29,80	21.211.083.160,51	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,49				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,49		
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	207.306.264,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	207.306.264,00	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	122.800.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	122.800.000,00	
1.03.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	84.506.264,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	84.506.264,00	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	10.218.817.782,00			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	10.218.817.782,00	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>10.038.817.782,00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>10.038.817.782,00</b>	
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	9.898.541.100,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	9.898.541.100,00	
1.03.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	80.082.682,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	80.082.682,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	60.194.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	60.194.000,00	
1.03.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	100%	90.000.000,00	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	100%	90.000.000,00	
1.03.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	
1.03.01.2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terkelola</b>	100%	90.000.000,00	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terkelola</b>	100%	90.000.000,00	
1.03.01.2.04.0007	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	90.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	90.000.000,00	
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60,80				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60,80		
1.03.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</b>	100%	282.000.000,00	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</b>	100%	282.000.000,00	
			<b>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</b>	100%				<b>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</b>	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	55,54%				<b>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	55,54%		
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	120.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	120.000.000,00	
1.03.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	42.000.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	42.000.000,00	
1.03.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	120.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	120.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,00				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,00		
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.038.985.879,27</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.038.985.879,27</b>	
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	612.985.879,27	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	612.985.879,27	
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	360.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	360.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	36.000.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	36.000.000,00	
1.03.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	9.463.973.235,24			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	9.463.973.235,24	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>75%</b>	<b>4.760.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>75%</b>	<b>4.760.000.000,00</b>	
1.03.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	840.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	840.000.000,00	
1.03.01.2.07.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	3.500.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	3.500.000.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	180.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	180.000.000,00	
1.03.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	240.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	240.000.000,00	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.160.634.667,24</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.160.634.667,24</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.639.312,24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.639.312,24	
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.995.355,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.995.355,00	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>85%</b>	<b>1.543.338.568,00</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>85%</b>	<b>1.543.338.568,00</b>	
1.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	361.538.568,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	361.538.568,00	
1.03.01.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	850.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	850.000.000,00	
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	90.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	90.000.000,00	
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	241.800.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	241.800.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (Pekerjaan Umum)					Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (Pekerjaan Umum)			
			% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik	43,70%				% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik	43,70%		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	66,30%	8.804.545.638,01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	66,30%	8.804.545.638,01	
			% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	62,42%	-			% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	62,42%	-	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	71,40%	5.340.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	71,40%	5.340.000.000,00	
			% Bangunan Pengaman Pantai dalam kondisi baik					% Bangunan Pengaman Pantai dalam kondisi baik			
1.03.02.2.01.0080	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4 KM	720.000.000,00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4 KM	720.000.000,00	
1.03.02.2.01.0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	600.000.000,00	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	600.000.000,00	
1.03.02.2.01.0101	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	4 KM	600.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	4 KM	600.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.02.2.01.0103	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	7 KM	1.200.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	7 KM	1.200.000.000,00	
1.03.02.2.01.0110	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4 KM	600.000.000,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4 KM	600.000.000,00	
1.03.02.2.01.0115	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	4 KM	600.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	4 KM	600.000.000,00	
1.03.02.2.01.0121	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	240.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	240.000.000,00	
1.03.02.2.01.0126	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	2 KM	600.000.000,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	2 KM	600.000.000,00	
1.03.02.2.01.0128	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	180.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	180.000.000,00	
1.03.02.2.02	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik</b>	<b>65%</b>	<b>3.464.545.638,01</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik</b>	<b>65%</b>	<b>3.464.545.638,01</b>	
1.03.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	6 KM	600.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	6 KM	600.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.02.2.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	1.626.000.000,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	1.626.000.000,00	
1.03.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM	780.000.000,00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM	780.000.000,00	
1.03.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	6 Lembaga	300.000.000,00	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	6 Lembaga	300.000.000,00	
1.03.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	158.545.638,01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	158.545.638,01	
			<b>% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</b>	<b>76,74%</b>				<b>% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</b>	<b>76,74%</b>		
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>% jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>76,74%</b>	<b>141.929.522.169,78</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>% jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>76,74%</b>	<b>141.929.522.169,78</b>	
			<b>% Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>					<b>% Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>			
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>49,47</b>	<b>141.929.522.169,78</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>49,47</b>	<b>141.929.522.169,78</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang Jembatan dalam kondisi mantap					Panjang Jembatan dalam kondisi mantap			
1.03.10.2.01.0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	661.124.607,89	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	661.124.607,89	
1.03.10.2.01.0030	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	175.500.000,00	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	175.500.000,00	
1.03.10.2.01.0031	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang Diganti	5 Jembatan	1.316.250.000,00	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang Diganti	5 Jembatan	1.316.250.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	46,52 KM	7.887.537.216,00	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	46,52 KM	7.887.537.216,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun (km)	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun (km)	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Pemali yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Pemali yang dibangun	0,21	246.485.538,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	0,21	246.485.538,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang dibangun	0,21	246.485.538,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang dibangun	0,21	246.485.538,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun	0,21	246.485.538,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang dibangun	0,21	246.485.538,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun	0,21	246.485.538,00			Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun	0,21	246.485.538,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Sungailiat	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Sungailiat	5,50	616.213.845,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Pemali	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Pemali	5,50	616.213.845,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Merawang	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Merawang	5,50	616.213.845,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Mendo Barat	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Mendo Barat	5,50	616.213.845,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Riau Silip	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Riau Silip	5,50	616.213.845,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Belinyu	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Belinyu	5,50	616.213.845,00	
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Bakam	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Bakam	5,50	616.213.845,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Puding Besar	5,50	616.213.845,00			Jalan Strategis Desa yang Dibangun di Kecamatan Puding Besar	5,50	616.213.845,00	
1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	24,675 KM	70.675.914.638,88	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	24,675 KM	70.675.914.638,88	
			Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat yang ditingkatkan	5,25	13.636.728.000,00			Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat yang ditingkatkan	5,25	13.636.728.000,00	
			Panjang Jalan di Kecamatan Pemali yang ditingkatkan	2,10	6.233.932.800,00			Panjang Jalan di Kecamatan Pemali yang ditingkatkan	2,10	6.233.932.800,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang ditingkatkan	2,10	6.233.932.800,00			Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang ditingkatkan	2,10	6.233.932.800,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang ditingkatkan	2,10	7.206.686.318,88			Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang ditingkatkan	2,10	7.206.686.318,88	
			Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang ditingkatkan	4,20	11.948.371.200,00			Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang ditingkatkan	4,20	11.948.371.200,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang ditingkatkan	4,20	11.948.371.200,00			Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang ditingkatkan	4,20	11.948.371.200,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang ditingkatkan	2,10	5.974.185.600,00			Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang ditingkatkan	2,10	5.974.185.600,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang ditingkatkan	2,10	5.974.185.600,00			Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang ditingkatkan	2,10	5.974.185.600,00	
			Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	0,53	1.519.521.120,00			Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	0,53	1.519.521.120,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	9,45 KM	13.870.599.210,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	9,45 KM	13.870.599.210,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan sungailiat yang dipelihara secara berkala	2,10	2.464.855.380,00			Panjang jalan dalam kecamatan sungailiat yang dipelihara secara berkala	2,10	2.464.855.380,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara secara berkala	1,05	1.232.427.690,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan sungailiat yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan sungailiat yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00	
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara secara berkala	2,10	585.000.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara secara berkala	2,10	585.000.000,00	
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara secara berkala	1,58	438.750.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara secara berkala	1,58	438.750.000,00	
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00	
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00	
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00	
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00			Panjang bahu jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara secara berkala	1,05	292.500.000,00	
1.03.10.2.01.0036	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	175.500.000,00	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	175.500.000,00	
1.03.10.2.01.0037	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	26,25 KM	3.203.868.669,00	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	26,25 KM	3.203.868.669,00	
1.03.10.2.01.0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	16 Jembatan	1.755.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	16 Jembatan	1.755.000.000,00	
1.03.10.2.01.0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	11 Jembatan	4.355.292.240,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	11 Jembatan	4.355.292.240,00	
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	42 Jembatan	10.530.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	42 Jembatan	10.530.000.000,00	
			Panjang Jembatan di Kecamatan Belinyu yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang Jembatan di Kecamatan Belinyu yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
			Panjang Jembatan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang Jembatan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
			Panjang jembatan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang jembatan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
			Panjang jembatan di Kecamatan Merawang yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang jembatan di Kecamatan Merawang yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
			Panjang jembatan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang jembatan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang jembatan di Kecamatan Pemali yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang jembatan di Kecamatan Pemali yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
			Panjang jembatan di Kecamatan Bakam yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang jembatan di Kecamatan Bakam yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
			Panjang jembatan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00			Panjang jembatan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun	5,25	1.316.250.000,00	
1.03.10.2.01.0041	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	25 KM	-	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	25 KM	-	
1.03.10.2.01.0042	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	6 Jembatan	1.316.250.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	6 Jembatan	1.316.250.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	585.000.000,00	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	585.000.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12,60 KM	19.013.061.600,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12,60 KM	19.013.061.600,00	
			Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat yang direhab	1,05	2.764.265.400,00			Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat yang direhab	1,05	2.764.265.400,00	
			Panjang Jalan di Kecamatan Pemali yang direhab	1,05	585.000.000,00			Panjang Jalan di Kecamatan Pemali yang direhab	1,05	585.000.000,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang direhab	1,05	585.000.000,00			Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang direhab	1,05	585.000.000,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang direhab	1,05	2.764.265.400,00			Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang direhab	1,05	2.764.265.400,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang direhab	2,10	1.170.000.000,00			Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang direhab	2,10	1.170.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang direhab	2,10	1.170.000.000,00			Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang direhab	2,10	1.170.000.000,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang direhab	2,10	5.528.530.800,00			Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang direhab	2,10	5.528.530.800,00	
			Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang direhab	2,10	1.170.000.000,00			Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang direhab	2,10	1.170.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Sungailiat yang direhab	1,05	234.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Sungailiat yang direhab	1,05	234.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Pemali yang direhab	1,05	234.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Pemali yang direhab	1,05	234.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Mendo Barat yang direhab	1,05	234.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Mendo Barat yang direhab	1,05	234.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Merawang yang direhab	1,05	234.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Merawang yang direhab	1,05	234.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Belinyu yang direhab	4,20	936.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Belinyu yang direhab	4,20	936.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Riau Silip yang direhab	2,10	468.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Riau Silip yang direhab	2,10	468.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Bakam yang direhab	2,10	468.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Bakam yang direhab	2,10	468.000.000,00	
			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Puding Besar yang direhab	2,10	468.000.000,00			Panjang Bangunan Pelengkap jalan di Kecamatan Puding Besar yang direhab	2,10	468.000.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5,46 KM	6.408.623.988,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5,46 KM	6.408.623.988,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,84	985.942.152,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,84	985.942.152,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Pemali yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,53	616.213.845,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Pemali yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,53	616.213.845,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,63	739.456.614,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,63	739.456.614,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,42	492.971.076,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,42	492.971.076,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,63	739.456.614,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,63	739.456.614,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang jalan dalam Kecamatan Merawang yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,32	369.728.307,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Merawang yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,32	369.728.307,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Bakam yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Bakam yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1,05	1.232.427.690,00	
			Panjang jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1,05	1.232.427.690,00			Panjang jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1,05	1.232.427.690,00	
			<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>					<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>			
			<b>% Rumah tangga yang menggunakan air minum</b>	<b>87,66</b>	<b>-</b>			<b>% Rumah tangga yang menggunakan air minum</b>	<b>87,66</b>	<b>-</b>	
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>% Rumah tangga yang menggunakan air minum</b>	<b>66,85</b>	<b>960.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>% Rumah tangga yang menggunakan air minum</b>	<b>66,85</b>	<b>960.000.000,00</b>	
1.03.03.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik</b>	<b>19.546</b>	<b>960.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik</b>	<b>19.546</b>	<b>960.000.000,00</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	180.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	180.000.000,00	
1.03.03.2.01.0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	480.000.000,00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	480.000.000,00	
1.03.03.2.01.0031	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	300.000.000,00	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	300.000.000,00	
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>		<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	<b>20,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>		<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	<b>20,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	
1.03.04.2.01	<b>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan dalam kondisi baik</b>	<b>1</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan dalam kondisi baik</b>	<b>1</b>	<b>480.000.000,00</b>	
1.03.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	360.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	360.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.04.2.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	120.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	120.000.000,00	
			% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	96,90%	-			% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	96,90%	-	
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL</b>	<b>25,39</b>	<b>1.080.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL</b>	<b>25,39</b>	<b>1.080.000.000,00</b>	
1.03.05.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik</b>	<b>250</b>	<b>1.080.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik</b>	<b>250</b>	<b>1.080.000.000,00</b>	
1.03.05.2.01.0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	180.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	180.000.000,00	
1.03.05.2.01.0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	240.000.000,00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	240.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.05.2.01.0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	480.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	480.000.000,00	
1.03.05.2.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	180.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	180.000.000,00	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>% Drainase dalam kondisi baik</b>	<b>77,59%</b>	<b>14.508.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>% Drainase dalam kondisi baik</b>	<b>77,59%</b>	<b>14.508.000.000,00</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% Panjang drainase dalam kondisi baik</b>	<b>77,83%</b>	<b>14.508.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% Panjang drainase dalam kondisi baik</b>	<b>77,83%</b>	<b>14.508.000.000,00</b>	
1.03.06.2.01.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	600.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	600.000.000,00	
1.03.06.2.01.0019	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000 Meter	600.000.000,00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000 Meter	600.000.000,00	
1.03.06.2.01.0021	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	600.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	600.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.06.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	120.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	120.000.000,00	
1.03.06.2.01.0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	576.000.000,00	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	576.000.000,00	
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	10.200.000.000,00	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	10.200.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dibangun	4200,00	2.400.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dibangun	4200,00	2.400.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dibangun	3150,00	1.800.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dibangun	3150,00	1.800.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dibangun	2100,00	1.200.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dibangun	2100,00	1.200.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	1050,00	600.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	1050,00	600.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dibangun	3150,00	1.800.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dibangun	3150,00	1.800.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dibangun	2100,00	1.200.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dibangun	2100,00	1.200.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dibangun	1050,00	600.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dibangun	1050,00	600.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dibangun	1050,00	600.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dibangun	1050,00	600.000.000,00	
1.03.06.2.01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	192.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	192.000.000,00	
1.03.06.2.01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.620.000.000,00	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.620.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dioperasikan dan dipelihara	3150,00	360.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dioperasikan dan dipelihara	3150,00	360.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	
			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00			Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dioperasikan dan dipelihara	1575,00	180.000.000,00	
					-					-	
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>		<b>CAKUPAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	<b>100%</b>	<b>6.571.987.577,04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>		<b>CAKUPAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	<b>100%</b>	<b>6.571.987.577,04</b>	
1.03.07.2.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Infrastruktur jalan Permukiman dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>6.571.987.577,04</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Infrastruktur jalan Permukiman dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>6.571.987.577,04</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.07.2.01.0007	Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	10 Unit	6.571.987.577,04	Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	10 Unit	6.571.987.577,04	
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>KETAATAN TERHADAP PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	100,00%	1.385.496.470,66	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>KETAATAN TERHADAP PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	100,00%	1.385.496.470,66	
1.03.08.2.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan.</b>	100,00%	1.385.496.470,66	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan.</b>	100,00%	1.385.496.470,66	
1.03.08.2.01.0021	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.025.496.470,66	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.025.496.470,66	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	360.000.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	360.000.000,00	
					-					-	
1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		<b>PERSENTASE BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.458.263,80</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		<b>PERSENTASE BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.458.263,80</b>	
1.03.09.2.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase bangunan gedung dalam kondisi baik</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.458.263,80</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase bangunan gedung dalam kondisi baik</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.458.263,80</b>	
1.03.09.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	156.000.000,00	Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	156.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	123.458.263,80	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	123.458.263,80	
1.03.09.2.01.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	360.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	360.000.000,00	
1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		<b>Presentase SDM jasa konstruksi yang terlatih</b>		<b>418.817.420,20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		<b>Presentase SDM jasa konstruksi yang terlatih</b>		<b>418.817.420,20</b>	
1.03.11.2.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>		<b>Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih</b>	<b>100,00%</b>	<b>238.817.420,20</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>		<b>Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih</b>	<b>100,00%</b>	<b>238.817.420,20</b>	
1.03.11.2.01.0014	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	60.000.000,00	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	60.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.11.2.01.0016	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	45 Orang	178.817.420,20	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	45 Orang	178.817.420,20	
1.03.11.2.02	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000.000,00</b>	
1.03.11.2.02.0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	120.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	120.000.000,00	
1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	60.000.000,00	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	60.000.000,00	
			<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)</b>					<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)</b>			
			<b>Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang ( RTRW/RDTR)</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>			<b>Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang ( RTRW/RDTR)</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.747.500.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.747.500.000,00</b>	
1.03.12.2.01	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan</b>	<b>100,00%</b>	<b>606.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan</b>	<b>100,00%</b>	<b>606.000.000,00</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.12.2.01.0003	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00	
1.03.12.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.000.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.000.000,00	
1.03.12.2.01.0013	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Laporan	270.000.000,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Laporan	270.000.000,00	
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	
1.03.12.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	240.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	240.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.12.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.03.12.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Kegiatan	30.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Kegiatan	30.000.000,00	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan</b>	<b>100%</b>	<b>721.500.000,00</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan</b>	<b>100%</b>	<b>721.500.000,00</b>	
1.03.12.2.03.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 dokumen	691.500.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 dokumen	691.500.000,00	
1.03.12.2.03.0007	Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	30.000.000,00	Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	30.000.000,00	
<b>1.030.12.2.04</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	
1.03.12.2.04.0003	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	30.000.000,00	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	30.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.03.12.2.04.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	30.000.000,00		
1.03.12.2.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	30.000.000,00	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	30.000.000,00		
1.03.12.2.04.0015	Sub Kegiatan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	30.000.000,00		
<b>JUMLAH</b>					<b>199.736.410.700,00</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>199.736.410.700,00</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan serta Tingkat Kabupaten. Ada Beberapa Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Sebagai Berikut :



**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Bangka**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik	43,7	Persen	
			% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	66,3	Persen	
			% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	62,42	Persen	
A.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	71,40	Persen	
			% Bangunan Pengaman Pantai dalam kondisi baik			
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4	KM	
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1	KM	
	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	4	KM	
	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	7	KM	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4	KM	
	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	4	KM	
	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2	Unit	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	2	KM	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	Dokumen	
<b>B.</b>	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah		% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	65	Persen	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	6	KM	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3	KM	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7	KM	
	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	6	Lembaga	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	<b>% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</b>	<b>76,74</b>	<b>Persen</b>	
			<b>% jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>76,74</b>	<b>Persen</b>	
			<b>% Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>		<b>Persen</b>	
<b>C.</b>	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	49,47		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	Dokumen	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1	KM	
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang Diganti	5	Jembatan	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	46,52	KM	
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	24,675	KM	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	9,45	KM	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1	KM	
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	26,25	KM	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	16	Jembatan	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	11	Jembatan	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	42	Jembatan	
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	25	KM	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	6	Jembatan	
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1	KM	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12,60	KM	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5,46	KM	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	<b>% Rumah tangga yang menggunakan air minum</b>	<b>66,85</b>	<b>Persen</b>	
<b>D.</b>	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik	19.546		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1	Unit	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</b>	<b>20</b>	<b>Persen</b>	
<b>E.</b>	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan dalam kondisi baik	1		
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1	Ton/Hari	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1	Dokumen	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL</b>	<b>25,39</b>	<b>Persen</b>	
<b>F.</b>	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik	250		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100	Rumah Tangga	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50	Rumah Tangga	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	<b>% Drainase dalam kondisi baik</b>	<b>77,59</b>	<b>Persen</b>	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
<b>G.</b>	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		% Panjang drainase dalam kondisi baik	77,83	Persen	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000	Meter	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000	Meter	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1	Drainase Lingkungan	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1	Dokumen	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1	Sistem Drainase Perkotaan	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10	Sistem Drainase Perkotaan	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1	Dokumen	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Kabupaten Bangka</b>	<b>CAKUPAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	
<b>H.</b>	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Infrastruktur jalan Permukiman dalam kondisi baik	100	Persen	
	Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	10	Unit	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Terdapat 13 butir pernyataan yang menjadi Prioritas Pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi
8. Energy
9. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
10. Kebudayaan Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
12. Bidang Perekonomian
13. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Terkait dengan ke-13 Prioritas nasional dimaksud, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka terkait erat dengan poin 6 yakni infrastruktur.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2024-2026, serta sasaran strategis rencana pembangunan daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026, antara lain :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2024-2026**

No	Tujuan Kabupaten	Indikator Tujuan Kabupaten	Sasaran Strategis Kabupaten	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Nilai)	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Kategori/Nilai)
				Indeks SPBE (Nilai)
				Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)
			Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya (Kategori)
2	Tujuan 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Nilai)	Sasaran 3.1: Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur (Nilai)
3	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Nilai)	Sasaran 4.4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)

Adapun rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka guna mendukung pencapaian strategis rencana pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.2.2**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka**

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2025
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB PD	Hasil Penilaian RB	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas PUPR	Nilai Evaluasi Akip	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat	BB (79,60)
2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (Pekerjaan Umum)	(% jalan dlm kondisi baik + % Irigasi dlm Kondisi Baik+% akses Air Minum Aman + % akses sanitasi)/ 4	23,68
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik dibagi Luas Daerah Irigasi dikali 100%	90,00%
		% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kabupaten di kali 100%	66,00%
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dasar	% Rumah tangga yang menggunakan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih dibagi Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan dikali 100%	92,20
		% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	Jumlah Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi/ Jumlah Rumah tangga kabupaten x 100%	96,90%
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	Nilai Komposit dari beberapa Indeks yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang ( RTRW/RDTR)	Jumlah advice planing yang di kelurakan / jumlah permohon advice planing x 100%	100%

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Penetapan Program dan Kegiatan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah program dan kegiatan yang menjadi acuan pada kebijakan umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun program-program acuan tersebut adalah:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

##### **3. Program Penyelenggaraan Jalan**

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

##### **4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

## **5. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional**

- Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

## **6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

## **7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

## **8. Program Pengembangan Permukiman**

- Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota

## **9. Program Penataan Bangunan Gedung**

- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

## **10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

## **11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

## **12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

### **3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2025 antara lain meliputi:**

- a. Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 berjumlah 12 program dan 25 kegiatan dan 95 sub kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan tersebar di seluruh Kabupaten Bangka;
- c. Total dana/pagu indikatif sesuai rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.199.736.410.700,00
- d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya Hal tersebut terjadi karena adanya Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.1 yang menginformasikan tentang Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.



**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**KABUPATEN BANGKA**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				19.061.538.568,00	APBD	21.519.174.657,60
							Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Sungailiat	29,80	210.000.000,00	APBD	248.767.516,80
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Sungailiat	13,49			
1	03	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Sungailiat	100%	210.000.000,00	APBD	248.767.516,80
							Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Sungailiat	100%			
1	03	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungailiat	6 Dokumen	125.000.000,00	APBD	143.360.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungailiat	24 Laporan	85.000.000,00	APBD	105.407.516,80
							<b>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</b>	Sungailiat	0%	7.860.000.000,00	APBD	10.381.858.529,40
1	03	01	2	02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</b>	Sungailiat	100%	7.680.000.000,00	APBD	10.165.858.529,40
1	03	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sungailiat	61 Orang/bulan	7.500.000.000,00	APBD	9.997.526.511,00
1	03	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungailiat	1 Dokumen	80.000.000,00	APBD	95.099.218,40
1	03	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Sungailiat	24 Laporan	100.000.000,00	APBD	73.232.800,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	01	2	03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	Sungailiat	100%	90.000.000,00	APBD	108.000.000,00
1	03	01	2	03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungailiat	12 Laporan	90.000.000,00	APBD	108.000.000,00
1	03	01	2	04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terkelola</b>	Sungailiat	100%	90.000.000,00	APBD	108.000.000,00
1	03	01	2	04	0007	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sungailiat	12 Dokumen	90.000.000,00	APBD	108.000.000,00
							<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	Sungailiat	60,80	410.000.000,00	APBD	338.400.000,00
1	03	01	2	05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</b>	Sungailiat	100%	410.000.000,00	APBD	338.400.000,00
							<b>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</b>	Sungailiat	100%			
							<b>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	Sungailiat	55,54%			
1	03	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sungailiat	1 Paket	120.000.000,00	APBD	144.000.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sungailiat	2 Dokumen	50.000.000,00	APBD	50.400.000,00
1	03	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sungailiat	20 Orang	240.000.000,00	APBD	144.000.000,00
							<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</b>	Sungailiat	<b>3,00</b>	<b>920.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.246.783.055,12</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	Sungailiat	<b>100%</b>	<b>920.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.246.783.055,12</b>
1	03	01	2	06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laptop, Printer dll)	Sungailiat	1 Paket	500.000.000,00	APBD	735.583.055,12
1	03	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungailiat	12 Laporan	360.000.000,00	APBD	432.000.000,00
1	03	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sungailiat	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD	43.200.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sungailiat	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD	36.000.000,00
							<b>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>Sungailiat</b>	<b>100%</b>	<b>9.661.538.568,00</b>	<b>APBD</b>	<b>9.303.365.556,28</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>Sungailiat</b>	<b>75%</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>4.410.290.001,91</b>
1	03	01	2	07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sungailiat	1 Unit	500.000.000,00	APBD	1.008.000.000,00
1	03	01	2	07	0003	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Sungailiat	1 Unit	300.000.000,00	APBD	2.898.290.001,91
1	03	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (genset dll)	Sungailiat	30 Unit	500.000.000,00	APBD	216.000.000,00
1	03	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sungailiat	2 Unit	200.000.000,00	APBD	288.000.000,00
							Pembangunan Gudang Office	Sungailiat	1 Unit	100.000.000,00	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Pembangunan Pagar Belakang Office	Sungailiat	1 Unit	100.000.000,00	APBD						
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>Sungailiat</b>	<b>100%</b>	<b>2.700.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>3.279.761.600,69</b>
1	03	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungailiat	12 Laporan	2.200.000.000,00	APBD	2.727.000.000,00
1	03	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sungailiat	12 Laporan	300.000.000,00	APBD	324.767.174,69
1	03	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sungailiat	12 Laporan	200.000.000,00	APBD	227.994.426,00
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Sungailiat</b>	<b>85%</b>	<b>5.461.538.568,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.613.313.953,68</b>
1	03	01	2	09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sungailiat	8 Unit	361.538.568,00	APBD	365.153.953,68



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	01	2	09	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Sungailiat	2 Unit	500.000.000,00	APBD	850.000.000,00
1	03	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sungailiat	54 Unit	100.000.000,00	APBD	108.000.000,00
1	03	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sungailiat	2 Unit	4.500.000.000,00	APBD	290.160.000,00
							Peningkatan Gedung Serba Guna DPUPR Kab. Bangka	Sungailiat	1 Unit	3.000.000.000,00	APBD	
							Rehabilitasi Mess DPUPR	Sungailiat	I unit	1.500.000.000,00	APBD	
1	03	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	Kab. Bangka	66,30%	6.926.000.000,00	APBD	7.929.191.094,39
							% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik					
1	03	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	Kab. Bangka	71,40%	4.150.000.000,00	APBD	4.430.000.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	02	2	01	0080	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (km)	Kab. Bangka	10 KM	720.000.000,00	APBD	727.200.000,00
							Operasi dan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di Kecamatan Sungailiat (Swakelola)	Sungailiat	4 KM	320.000.000,00		
							Operasi dan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di Kecamatan Pemali (Swakelola)	Pemali	2,5 Km	200.000.000,00		
							Operasi dan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di Kecamatan Belinyu (Swakelola)	Belinyu	2,5 KM	200.000.000,00		
							Operasi dan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di Kecamatan Merawang - Mendo Barat (Swakelola)	Merawang - Mendo Barat	1 KM			
1	03	02	2	01	0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Bangka	9 KM	1.000.000.000,00	APBD	1.100.000.000,00
							Normalisasi Alur Sungai Desa Riding Panjang Kec. Merawang (Darurat)	Merawang	1 KM	100.000.000,00		
							Normalisasi Alur Sungai Jl Bahari Kec. Belinyu	Belinyu	1.5 Km	150.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Normalisasi Alur Sungai Pepabri Kel. Lubuk Kelik Kec. Sungailiat	Sungailiat	1.5 Km	150.000.000,00						
		Pengerukan Alur Sungai Muara Pelabuhan Parit Pekir Kec. Sungailiat	Sungailiat	1 Km	150.000.000,00						
		Pengerukan Alur Sungai Kp. Gedong Desa Lumut Kec. Belinyu	Sungailiat	1.5 Km	150.000.000,00						
		Pengerukan Alur Sungai Desa Mapur Kec. Riau Silip	Sungailiat	1.5 Km	150.000.000,00						
		Pengerukan Alur Sungai Kelurahan Kuday Kec. Sungailiat	Sungailiat	1 Km	150.000.000,00						
1	03	02	2	01	0101	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (km)	Kab. Bangka	0,24	1.200.000.000,00	APBD	1.320.000.000,00
						Peningkatan bangunan perkuatan tebing Desa Air Ruay Kec. Pemali	Pemali	0,08	200.000.000,00	APBD	
						Peningkatan Drainase Primer Desa Pagarawan Kec. Merawang		0,08	200.000.000,00	APBD	
						Peningkatan Drainase Primer Parit VII Kuday Kec. Sungailiat		0.05	150.000.000,00	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Peningkatan Drainase Primer Desa Petaling Banjar Kec. Mendo Barat		0,08	200.000.000,00	APBD						
		Peningkatan Drainase Primer Belakang Kantor Perikanan Bukit Betung Kec. Sungailiat		0.05	150.000.000,00	APBD						
		Peningkatan Drainase Primer Kp. Sekip Kel Belinyu Kec. Belinyu		0.05	150.000.000,00	APBD						
		Peningkatan Drainase Primer Kel. Mantung Kec. Belinyu		0.05	150.000.000,00	APBD						
		Peninggian dan Peningkatan Drainase Primer Kel. Surya Timur (Lingk. Tunas Kelapa) Kec. Sungailiat										
1	03	02	2	01	0110	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (km)	Kab. Bangka	0,42	600.000.000,00	APBD	606.000.000,00
							Pembangunan Talud Perumahan Pesona Bangka (Proposal masih di SDA) (Darurat)	Sungailiat	0,06	150.000.000,00	APBD	
							Perbaiki Drainase Primer Jl. Ambalat RT.03 Dusun Air Bakung Desa Air Ruai Kec. Pemali (Darurat)	Pemali	0,06	150.000.000,00	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Rehabilitasi Drainase Primer MTs- Pasar Inpres Kec. Pemali	Pemali	0,15	150.000.000,00	APBD						
		Rehabilitasi Drainase Primer Air Culai - Perpat Permai Kec. Belinyu	Belinyu	0,15	150.000.000,00	APBD						
1	03	02	2	01	0121	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Bangka	3 Unit	450.000.000,00	APBD	495.000.000,00
							Peningkatan Talud Embung Desa Lumut Kec. Belinyu		1 Unit	150.000.000,00		
							Peningkatan Talud Embung Desa Kapuk Kec. Bakam		1 Unit	150.000.000,00		
							Pembangunan Embung Kelurahan Kuto Panji Kec. Belinyu		1 Unit	150.000.000,00		
1	03	02	2	01	0128	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kab. Bangka	1 Dokumen	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	02	2	02		<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>65%</b>	<b>2.776.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>3.499.191.094,39</b>
1	03	02	2	02	0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (km)	Kab. Bangka	0,34	500.000.000,00	APBD	606.000.000,00
							Peningkatan Jaringan Irigasi Niur Lama Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip	Banyu Asin	0,2	200.000.000,00		
							Pembangunan Saran Penunjang Akses Daerah Irigasi Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip	Riau Silip	0,07	150.000.000,00		
							Pembangunan Saran Penunjang Akses Daerah Irigasi Desa Pangkal Niur Kec. Riau Silip	Riau Silip	0,07	150.000.000,00		
1	03	02	2	02	0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (km)	Kab. Bangka	1,2	1.626.000.000,00	APBD	1.642.260.000,00
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Nibung Kec. Puding Besar		0,6	1.026.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Pangkal Niur Kec. Riau Silip		0,2	200.000.000,00							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Tanah Bawah Kec. Puding Besar		0,2	200.000.000,00							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Labu Kec. Puding Besar		0,2	200.000.000,00							
1	03	02	2	02	0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Bangka	2 KM	200.000.000,00	APBD	787.800.000,00
1	03	02	2	02	0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Kab. Bangka	6 Lembaga	300.000.000,00	APBD	303.000.000,00
1	03	02	2	02	0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Bangka	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	160.131.094,39
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>% jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>76,74%</b>	<b>152.083.872.132,00</b>	<b>APBD</b>	<b>151.787.884.148,01</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>49,47</b>	<b>152.083.872.132,00</b>	<b>APBD</b>	<b>151.787.884.148,01</b>



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	10	2	01	0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab. Bangka	3 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD	667.735.853,97
1	03	10	2	01	0030	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kab. Bangka	734,501 KM	250.000.000,00	APBD	177.255.000,00
1	03	10	2	01	0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (km)	Kab. Bangka	8,00	3.800.000.000,00	APBD	7.966.412.588,16
							Pembangunan Jalan Matras-Bedukang	Sungailiat	1,93	1.250.000.000,00		
							Pembangunan Jalan Beton Parit Pekir Kel. Sungailiat	Sungailiat	0,18	200.000.000,00		
							Pembangunan Jalan Pendidikan I (Jalan Beton) Kelurahan Matras	Sungailiat	0,18	200.000.000,00		
							Pembangunan Jalan Pendidikan II (Jalan Beton) Kelurahan Matras	Sungailiat	0,18	200.000.000,00		
							Pembangunan Jalan Cor Beton Masjid Baitul	Sungailiat	0,14	150.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Izzah Rawa Bangun Sungailiat					
		Pembangunan Jalan RT 03 Rambak Kelurahan Jelitik	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan Jalan kampung pasir kelurahan Kudai	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan Jalan Menuju MIN Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan Jalan Cemara Kec. Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan Jalan Gg. Family Kelurahan Kenanga	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Air Merapin RT. 07 (Gg. Galunggung 2 s.d SD Harapan Lingk. Parit Pekir)	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan Jalan Tanah Puru Jalan Lingkar Air Pelawan Desa Pugul Kec. Riau Silip	Riau Silip	0,60	200.000.000,00		
		Jalan Lingkar Desa dari RT 004 sampai TB 17 RT 005 Dusun Riau	Riau Silip	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan Jalan Menuju ke Kantor Kelurahan Belinyu	Belinyu	0,60	200.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	03	10	2	01	0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	Kab. Bangka	53,99	91.645.696.497,00	APBD	77.379.227.279,50
							Pengaspalan (Hotmik) Jalan Kantor Desa dan Jalan Lingkar Desa Mabat	Bakam	1,11	2.000.000.000,00		
							Peningkatan Jalan Lingkar Desa Bukit Layang	Bakam	1,64	2.950.500.000,00		
							Peningkatan jalan Kp Bantam Kel. Bukit Ketok	Belinyu	1,11	2.000.000.000,00		
							Peningkatan jalan Jl Raya Belinyu-Penyusuk Kel. Romodong Indah	Belinyu	3,33	6.000.000.000,00		
							Peningkatan Jalan PGRI Belinyu	Belinyu	1,67	3.000.000.000,00		
							Peningkatan Jalan Desa Mulakarya Telang Dalam sampai KD Panji Desa Gunung Muda	Belinyu	1,64	2.950.000.000,00		
							Peningkatan Jalan Kantor Desa Petaling Banjar Kec. Mendo Barat	Mendo Barat	0,83	1.500.000.000,00		
							Peningkatan Jalan Kemuja - Pesantren Haji Nawi Kecamatan Mendo Barat	Mendo Barat	2,22	4.000.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Jalan Sinkai Desa Merawang Kec. Merawang	Merawang	0,83	1.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Kimak-Limbung Desa Jada Bahrin Kec. Merawang	Merawang	1,67	3.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Sp. Jurung - Sempan Kecamatan Merawang	Merawang	2,22	4.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Air Duyung - Air Anyir	Merawang	1,67	3.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan PLTD-Kp.Pasir-Kp. Jawa	Merawang	1,39	2.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan AMD-Serendang	Merawang	1,39	2.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan PNPM Desa Balunijuk	Merawang	1,11	2.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Trans Harapan Indah Desa Sempan Kec. Pemali	Pemali	0,83	1.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Sumatra - Ktr Camat Kecamatan Pemali	Pemali	0,83	1.500.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Jalan Air Duren-Melati-Lubuk Kelik Kecamatan Pemali	Pemali	2,78	5.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Mentawai	Pemali	1,67	3.000.000.000,00		
		Peningkatan jalan lingkaran desa Saing	Puding Besar	0,83	1.500.000.000,00		
		peningkatan jalan lingkaran desa Nibung	Puding Besar	0,83	1.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Tungkup TB.17 Kec.Riau Silip (Jalan Box Culvert dan Jembatan)	Riau Silip	2,22	4.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Dusun Sinkai RT 05 Desa Lumut	Riau Silip	0,67	1.200.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Danau Ranau Depan Islamic Center dan Depan Kantor Kelurahan Matras	Sungailiat	0,83	1.500.000.000,00		
		Peningkatan jalan lingkaran selatan Kelurahan Sinar Baru	Sungailiat	0,83	1.500.000.000,00		
		Peningkatan jalan Jl. Merak lingkaran samratulangi, jl simun lingkaran srimenanti Kel. Srimenanti	Sungailiat	1,39	2.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Primeri ST 12. Sungailiat	Sungailiat	0,83	1.500.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Jalan Cemara Sri Pemandang dan Kampung Batu Gg Bangka Sri Menanti	Sungailiat	1,11	2.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Pucuk Merah Sungailiat	Sungailiat	1,30	2.333.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Kampung Baru Lingkungan Limbang Jaya Surya Timur	Sungailiat	0,92	1.652.196.497,00		
		Peningkatan Jalan Panjang Sungailiat	Sungailiat	1,67	3.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan PDAM Sungailiat	Sungailiat	0,83	1.500.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Teluk Uber - Tanjung Batu Sungailiat	Sungailiat	1,67	3.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Maria Goretti Kec.Sungailiat	Sungailiat	1,11	2.000.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Bata Merah (Matras)	Sungailiat	0,70	1.260.000.000,00		
		Peningkatan Jalan Rambak - Dewi Kwan Im	Sungailiat	0,70	3.000.000.000,00		
		Pembangunan Siring Jalan Raya Desa Mabat	Bakam	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Saluran Jalan di Desa Bukit Layang	Bakam	0,40	200.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembangunan saluran jalan Desa Mangka	Bakam	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Saluran Jalan Batu Tunu Air Asem Belinyu	Belinyu	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan saluran RT 05 Desa Bintet	Belinyu	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Saluran Jalan Depan Kantor Desa Riding Panjang	Merawang	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Talud Jalan Kerkay Desa Pagarawan	Merawang	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan saluran Jalan Simpang Jurung - Sempan Desa Dwi Makmur Kec. Merawang	Merawang	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Saluran Jalan di Desa Penyamun	Pemali	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan saluran jalan Duyung Raya Desa Karya Makmur Kec. Pemali	Pemali	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Talud dan Pengerasan Bahu Jalan Lingkar Desa Labu	Puding Besar	0,40	200.000.000,00		
		Pembangunan Saluran Kampung Seruk Desa Rebo	Sungailiat	0,40	200.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Pembangunan saluran air lingk Perum Taman Pesona Blok AI RT 11 Bukit Betung	Sungailiat	0,40	200.000.000,00							
		Peningkatan Jalan Setapak Gg. Toba (St 12)	Sungailiat	0,40	200.000.000,00							
1	03	10	2	01	0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	Kab. Bangka	31,10	33.188.175.635,00	APBD	36.506.993.198,50
							Pemeliharaan Berkala Jalan Panji Baru - Kapten Tendean-Batin Tikal	Belinyu	1,17	3.500.000.000,00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan Air Asem - Parit II	Belinyu	0,67	2.000.000.000,00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Belinyu	Belinyu	1,00	3.000.000.000,00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan Air Duren - Tua Tunu	Mendo Barat	1,67	5.000.000.000,00		
							Pemeliharaan berkala Jalan Petaling-Pangkal Mendo Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat	Mendo Barat	1,00	3.000.000.000,00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan Nelayan 1,2	Sungailiat	1,00	3.000.000.000,00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan A.Yani Sungailiat	Sungailiat	1,00	3.000.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemeliharaan Berkala Jalan Diponegoro Sungailiat	Sungailiat	1,00	2.000.000.000,00		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Pantai Batu Bedaun	Sungailiat	1,00	1.488.175.635,00		
		Pengerasan Bahu Jalan dan Talud Jalan Seniur Kec.Pemali	Pemali	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Andalas Kec.Pemali	Pemali	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Bima Desa Air Ruay	Pemali	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Sigembir - Penyamun	Pemali	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Koperasi Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Air Merapin Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Kp. Nelayan - Gudang Item Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Sambu Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Tembus Pasar Bawah	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Tarumanegara Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengerasan Bahu Jalan Kenanga - Tj. Ratu Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Air Kenanga - Pantai Rebo Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan TB 23 - Kimhin Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Kelinci - Simpalet Sungailiat	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Parit IV Kuday	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Yos Sudarso	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Sam Ratulangi	Sungailiat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan TK Lama Merawang	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Lingkar Kimak Desa Kimak	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Air Dayung Merawang	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Gambir Merawang	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Desa Air Anyir	Merawang	0,60	200.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengerasan Bahu Jalan Balunijuk - Kerabut	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Sp. Jurung - Batu Ampar Merawang	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan TK Mekar Sari	Merawang	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan di Desa Paya Benua	Mendo Barat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Desa Zed Mendo Barat	Mendo Barat	0,60	200.000.000,00		
		Pembangunan saluran dan perkerasan bahu jalan Desa Kemuja Kec. Mendo Barat	Mendo Barat	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Gajah Mada Belinyu	Belinyu	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan TB. 01 Riding Panjang Kecamatan Belinyu	Belinyu	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Cangkum Desa Riding Panjang	Belinyu	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Bukit Mang Kadir Desa Riding Panjang	Belinyu	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan Bedukang Desa Deniang	Riau Silip	0,60	200.000.000,00		
		Pengerasan Bahu Jalan di Desa Mangka	Bakan	0,60	200.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Pengerasan Bahu Jalan di Desa Mabat	Bakam	0,60	200.000.000,00							
		Pengerasan Bahu Jalan Sawit Desa Puding Besar	Puding Besar	0,60	200.000.000,00							
1	03	10	2	01	0036	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Kab. Bangka	74 KM	250.000.000,00	APBD	275.000.000,00
1	03	10	2	01	0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Bangka	5 Jembatan	250.000.000,00	APBD	1.772.550.000,00
1	03	10	2	01	0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kab. Bangka	18 Jembatan	15.000.000.000,00	APBD	16.500.000.000,00
						1	Plat Deker SD MIN Sungailiat			200.000.000,00		
						2	Pembangunan Jembatan di KD Mentok Mapur			3.000.000.000,00		
						3	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Belakang Raja Laut Kelurahan Sri Menanti			130.000.000,00		
						4	Pembangunan Box Culvert Jalan PNPM Tanah Bawah Kec.Puding Besar			200.000.000,00		
						5	Pembangunan Box Culvert Jalan Natuna			150.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lubuk Kelik Kec.Sungailiat					
	6	Pembangunan Plaat Duikers Jalan Limbang Jaya Kimhin			150.000.000,00		
	7	Pembangunan Box Culvert Jalan Air Kacip Kec.Belinyu			200.000.000,00		
	8	Pembangunan Box Culvert Jalan Adidas Belinyu			200.000.000,00		
	9	Pembangunan Box Culvert Jalan Pangkal Mendo-Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat			1.000.000.000,00		
	10	Pembangunan Jembatan Desa Kace Timur			600.000.000,00		
	11	Pembangunan Plaat Tenggiri Dusun Air Antu Kec.Riau Silip			300.000.000,00		
	12	Pembangunan Plaat Duiker RT 02 Parit 5 Lingk. Kimhin Kelurahan Sinar Baru			200.000.000,00		
	13	Pembangunan Jembatan Tungkup			3.720.000.000,00		
	14	<i>Pembangunan Jembatan RT 07 Lingk 3 Kel. Air Asam</i>			3.750.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
	15	Pembangunan Box Culvet Jl, Kp. Bukit Dempo Kel. Bukit Ketok			200.000.000,00							
	16	Pembangunan Box Culvert Jl. A. Yani Kel. Bukit Ketok			200.000.000,00							
	17	<i>Pembangunan Jembatan Kayu Bukit Kanjer Desa Kimak Kec. Merawang (12 Meter)</i>			200.000.000,00							
	18	<i>Pembangunan Box Culvert Jalan TK Lama Merawang</i>			600.000.000,00							
1	03	10	2	01	0042	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Bangka	1 Jembatan	3.000.000.000,00	APBD	3.300.000.000,00
1	03	10	2	01	0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Bangka	734,501 KM	700.000.000,00	APBD	770.000.000,00
1	03	10	2	01	0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Bangka	150 KM	3.000.000.000,00	APBD	6.472.710.227,88
							Panjang jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Sungailiat				995.801.573,52
							Panjang jalan dalam Kecamatan Pemali yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Pemali				622.375.983,45



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Belinyu				746.851.180,14
		Panjang jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Riau Silip				497.900.786,76
		Panjang jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Mendo Barat				746.851.180,14
		Panjang jalan dalam Kecamatan Merawang yang dilakukan Pemeliharaan secara rutin	Merawang				373.425.590,07
		Panjang jalan dalam Kecamatan Bakam yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Bakam				1.244.751.966,90
		Panjang jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Puding Besar				1.244.751.966,90



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>% Rumah tangga yang menggunakan air minum</b>	Kab. Bangka	66,85	1.460.000.000,00	APBD	969.600.000,00
1	03	03	2	01		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik</b>	Kab. Bangka	19.546	1.460.000.000,00	APBD	969.600.000,00
1	03	03	2	01	0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab. Bangka	1 Dokumen	680.000.000,00	APBD	181.800.000,00
1	03	03	2	01	0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Bangka	1 Unit	480.000.000,00	APBD	484.800.000,00
1	03	03	2	01	0031	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi - optimalisasi jaringan perpipaan di Dusun Nibung Jaya	Kab. Bangka	2 Unit	300.000.000,00	APBD	303.000.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	05				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL</b>	Kab. Bangka	25,39	1.580.000.000,00	APBD	1.090.800.000,00
1	03	05	2	01		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik</b>	Kab. Bangka	250 Spal Perdesaan	1.580.000.000,00	APBD	1.090.800.000,00
1	03	05	2	01	0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Bangka	50 Rumah Tangga	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
1	03	05	2	01	0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Bangka	5 Unit	240.000.000,00	APBD	242.400.000,00
1	03	05	2	01	0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kab. Bangka	25 Rumah Tangga	480.000.000,00	APBD	484.800.000,00
1	03	05	2	01	0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Bangka	1 Dokumen	680.000.000,00	APBD	181.800.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>% Drainase dalam kondisi baik</b>	Kab. Bangka	77,59%	14.188.000.000,00	APBD	14.419.880.000,00
1	03	06	2	01		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% Panjang drainase dalam kondisi baik</b>	Kab. Bangka	77,83%	14.188.000.000,00	APBD	14.419.880.000,00
1	03	06	2	01	0012	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Bangka	4000 M	1.000.000.000,00	APBD	1.100.000.000,00
1	03	06	2	01	0019	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Bangka	1000 Meter	600.000.000,00	APBD	606.000.000,00
1	03	06	2	01	0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Sistem Drainase Perkotaan	576.000.000,00	APBD	581.760.000,00
1	03	06	2	01	0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Bangka	10 Sistem Drainase Perkotaan	10.200.000.000,00	APBD	10.302.000.000,00
							Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dibangun	Sungailiat	4200,00	2.400.000.000,00	APBD	2.424.000.000,00
							Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dibangun	Pemali	3150,00	1.800.000.000,00	APBD	1.818.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dibangun	Merawang	2100,00	1.200.000.000,00	APBD	1.212.000.000,00					
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	Mendo Barat	1050,00	600.000.000,00	APBD	606.000.000,00					
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dibangun	Belinyu	3150,00	1.800.000.000,00	APBD	1.818.000.000,00					
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dibangun	Riau Silip	2100,00	1.200.000.000,00	APBD	1.212.000.000,00					
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dibangun	Puding Besar	1050,00	600.000.000,00	APBD	606.000.000,00					
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dibangun	Bakam	1050,00	600.000.000,00	APBD	606.000.000,00					
1	03	06	2	01	0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kab. Bangka	1 Dokumen	192.000.000,00	APBD	193.920.000,00
1	03	06	2	01	0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Bangka	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.620.000.000,00	APBD	1.636.200.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dioperasikan dan dipelihara	Kab. Bangka	3150,00	360.000.000,00	APBD	363.600.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Pemali yang dioperasikan dan dipelihara	Pemali	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Merawang yang dioperasikan dan dipelihara	Merawang	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dioperasikan dan dipelihara	Mendo Barat	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dioperasikan dan dipelihara	Belinyu	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dioperasikan dan dipelihara	Riau Silip	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dioperasikan dan dipelihara	Puding Besar	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00
		Panjang saluran jalan dalam Kecamatan Bakam yang dioperasikan dan dipelihara	Bakam	1575,00	180.000.000,00	APBD	181.800.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
												-
1	03	08				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>KETAATAN TERHADAP PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.360.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.463.600.000,00</b>
1	03	08	2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan.</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.360.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1.463.600.000,00</b>
1	03	08	2	01	0021	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	1 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD	1.100.000.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Bangka	100 Dokumen	360.000.000,00	APBD	363.600.000,00
												-
1	03	09				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PERSENTASE BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA</b>	Kab. Bangka	100,00%	672.000.000,00	APBD	739.200.000,00
1	03	09	2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase bangunan gedung dalam kondisi baik</b>	Kab. Bangka	100,00%	672.000.000,00	APBD	739.200.000,00
1	03	09	2	01	0010	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	100 Dokumen	672.000.000,00	APBD	739.200.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	11				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Presentase SDM jasa kontruksi yang terlatih	Kab. Bangka	100%	380.000.000,00	APBD	341.200.000,00
1	03	11	2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih	Kab. Bangka	60 Orang	200.000.000,00	APBD	220.000.000,00
1	03	11	2	01	0016	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Bangka	60 Orang	200.000.000,00	APBD	220.000.000,00
1	03	11	2	02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	Kab. Bangka	1 Dokumen	180.000.000,00	APBD	121.200.000,00
1	03	11	2	02	0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangka	10 Orang	180.000.000,00	APBD	121.200.000,00
1	03	12				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bangka	100,00%	2.025.000.000,00	APBD	2.227.500.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	12	2	01		<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan</b>	Kab. Bangka	1 Dokumen	<b>300.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>330.000.000,00</b>
1	03	12	2	01	0013	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kab. Bangka	1 Laporan	300.000.000,00	APBD	330.000.000,00
1	03	12	2	02		<b>Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan</b>	Kab. Bangka	5 Dokumen	<b>900.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>990.000.000,00</b>
1	03	12	2	02	0005	Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kab/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	5 Dokumen	900.000.000,00	APBD	990.000.000,00
1	03	12	2	03		<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan</b>	Kab. Bangka	1 Dokumen	<b>475.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>522.500.000,00</b>
1	03	12	2	03	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kab. Bangka	1 dokumen	475.000.000,00	APBD	522.500.000,00



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiran Maju Rencana Tahun 2026
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8
1	03	12	2	04		<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya</b>	Kab. Bangka	3 Dokumen	<b>350.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>385.000.000,00</b>
1	03	12	2	04	0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Bangka	1 Dokumen	350.000.000,00	APBD	385.000.000,00
<b>TOTAL KESELURAHAN</b>										<b>199.736.410.700,00</b>		<b>202.488.029.900,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 secara umum memuat Rencana Kerja program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2024.

#### **5.1 Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan**

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

#### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan pengelolaan perencanaan dan peningkatan kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

- a. Koordinasi yang baik dengan badan/dinas terkait dalam hal pemenuhan data maupun informasi lainnya
- b. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas
- c. Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Agar adanya konsistensi anggaran yang sudah ditetapkan didalam DPA.
- e. Kegiatan yang telah direncanakan diupayakan secara optimal untuk dipercepat lagi proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terutama kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (propinsi, pusat, dll)

Sungailiat, 30 Juli 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKA**

**Mulyarto Kurniawan, S.Pd.,M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP.198103112003121002



## **BUPATI BANGKA**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
  - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
  - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023  
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

### III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Insepktorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

### IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

#### VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

#### IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kapala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kapala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kapala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

### XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

### XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

### XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

### XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

### XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

### XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

#### XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

#### XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

#### XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

#### XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

#### XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PELAKSANA</b>
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka	Minggu I Desember 2023		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	Minggu I Desember 2023 – Minggu I Februari 2024	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2024		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2024		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5-8 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua Februari 2024	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	12 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	12 Februari-11 Maret 2024		Seluruh PD
8	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	4-6 Maret 2024	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
9	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2024		Bappeda dan Seluruh PD
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	18 – 21 Maret 2024		Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	2 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2024		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	3-11 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	15-26 Juli 2024	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	26-29 Juli 2024		Bappeda
16	Penetapan Renja PD melalui Perbup	30 Juli 2024	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda